

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA
DESA WISATA KAMPUANG SARUGO DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

*Collaborative Governance in the Management of the Kampuang Sarugo
Tourism Village in Lima Puluh Kota Regency*

¹Nisa Ul Husna, ²Roni Ekha Putera, ³Desna Aromatica

^{1,2,3}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

¹nisahusna90@gmail.com, ²roniekhaputera@soc.unand.ac.id, ³desnaaromatica@yahoo.co.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Pariwisata, Kolaborasi,
Desa Sarugo, Destinasi
Wisata.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi mengikuti perkembangan waktu. *Collaborative Governance* merupakan sebuah konsep dalam upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu bentuk *Collaborative Governance* pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para aktor dan proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Sarugo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, Peneliti melakukan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive*. Berdasarkan analisa Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor sudah berperan dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, namun peran dan proses kolaborasi yang berjalan belum maksimal. Partisipasi aktor belum optimal, di mana Pokdarwis belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengelola desanya, sedangkan partisipasi yang diberikan oleh aktor dalam kolaborasi banyak berupa pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan destinasi wisata. Dimulai dari kondisi awal adanya ketidakseimbangan sumber daya yang mendorong terjadinya kolaborasi. Pada desain kelembagaan, seluruh pihak memberikan partisipasi melalui masing-masing perannya. Proses kolaborasi sudah berjalan namun belum optimal. Diperoleh hasil sementara, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sarugo. Namun hasil yang diharapkan, yaitu nantinya masyarakat terutama Pokdarwis bisa benar-benar mandiri dalam mengelola Desa Wisata Sarugo dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Keywords:

Keywords: Tourism, Collaboration, Sarugo Village, Tourist Destinations

Abstract

In order to meet the increasingly diverse needs of society, the government is expected to be able to adapt to the environment and situations following developments over time. Collaborative Governance is a concept in the government's collaborative efforts with various stakeholders in order to meet common needs. One form of Collaborative Governance in the Lima Puluh Kota Regency Government is collaboration in the governance of the Kampuang Sarugo Tourism Village. This research aims to analyze the role of actors and the collaboration process implemented in the management of Sarugo Village. The research method used is descriptive qualitative. To collect data, Researchers used 2 methods, namely interviews and documentation. Research informants were selected using purposive techniques. Based on the Researcher's analysis using Ansell and Gash's theory, the results of the research are that all actors have played a role in the collaborative management of Sarugo Village, but their roles and ongoing collaboration processes have not been maximized. Actor participation which is not yet optimal, where Pokdarwis do not yet have the understanding and ability to manage their villages, while the participation given by actors in collaboration is mostly in the form of guidance and training regarding the management of tourist destinations. Starting from the initial condition, there is an imbalance of resources that encourages collaboration. Regarding institutional design, all parties provide participation through their respective roles. The collaboration process is already underway but not yet optimal. And temporary results were obtained, namely improving the economy of the community in Sarugo village. However, the expected result is that in the future the community, especially the Pokdarwis, will be able to be truly independent in managing the Sarugo Tourist Village and provide welfare for the community.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu aset terbesar penunjang perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Soebagio, pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan

teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Dari peraturan tersebut maka dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari destinasi pariwisata agar tercapai tujuan-tujuan yang disebutkan diatas.

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan yang luas menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Keindahan ini terdiri dari beragam jenis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi pariwisata baik dari keindahan alam maupun budaya. Terkenal dengan keramahannya, masyarakat Sumatera Barat mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Belum lagi makanan yang beragam dan umumnya selalu cocok bagi setiap lidah yang mencobanya. Dengan beragam keunikan tersebut, menjadikan Sumatera Barat memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri bagi para pengunjung, baik domestik maupun mancanegara untuk selalu datang dan mengunjungi Sumatera Barat. Tak heran jika jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Oktober 2023 mencapai 4.925 kunjungan.

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang menyimpan potensi pariwisata adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota menawarkan berbagai budaya, adat, tradisi, dan wisata yang tidak kalah menarik dari daerah lain. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan jumlah 798.701 orang menjadi berjumlah 954.782 orang pada tahun 2022. Dengan demikian berarti mengalami peningkatan sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan jumlah kunjungan ini dikarenakan munculnya objek-objek wisata baru yang kekinian dan diminati kebanyakan oleh kaum milenial.

Ada banyak destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebanyak 54 destinasi wisata. Destinasi tersebut didominasi oleh wisata alam dengan jumlah 33 destinasi, lalu 16 destinasi wisata sejarah, dan 5 destinasi wisata budaya. Dari keseluruhan destinasi tersebut, ada beberapa yang sudah memiliki fasilitas objek seperti sarana prasarana dan ada juga yang belum memiliki fasilitas sama sekali. Dari 54 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satunya adalah Desa Wisata Kampuang Sarugo. Kampuang Sarugo merupakan desa wisata yang berhasil meraih juara 2 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2020 dengan kategori kampung adat terpopuler.

Kampuang Sarugo terletak di Jorong Sungai Dadok, Kenagarian Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Dengan jumlah penduduk ± 800 jiwa, daerah ini memiliki luas ± 10 ha dengan ketinggian 800-1200 mdpl pada wilayah perbukitan dengan tanah yang subur sehingga didominasi perkebunan dan pertanian. Sarugo berjarak sekitar 152 km dari Bandara Internasional Minangkabau dengan jarak tempuh 4 sampai 5 jam menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Nama Sarugo merupakan akronim dari kata Saribu Gonjong dikarenakan terdapat banyak rumah gadang di desa wisata ini. Rumah gadang merupakan rumah kaum atau suku yang digunakan sebagai tempat pertemuan bagi setiap suku dalam mendidik anak kemenakan. Uniknya, rumah gadang yang berada disini telah berdiri berpuluh tahun yang lalu dan semuanya berbaris rapi menghadap matahari terbit dengan jumlah 9 shaf dan beratapkan gonjong lima. Gonjong 5 ini melambangkan 5 rukun islam sesuai dengan filsafah minang "*adat basandi sara', sara' basandi kitabullah*".

Sejak 4 tahun diresmikan, Desa Wisata Kampuang Sarugo mampu meraih beberapa prestasi atau penghargaan. Penghargaan pertama yang didapat, yaitu Kampuang Sarugo ditetapkan sebagai *Smart Branding* Kabupaten Lima Puluh Kota pada November 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, Desa Wisata Kampuang Sarugo berhasil meraih juara dua kategori desa wisata, yaitu kampung adat terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (*API Award*) yang diadakan oleh Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Penghargaan selanjutnya yang diraih oleh Desa Sarugo, yaitu berhasil menjadi juara 1 POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata terbaik se-Sumatera Barat pada tahun 2021. Penghargaan selanjutnya yang diraih oleh Kampuang Sarugo, yaitu pada tahun 2021 Kampuang Sarugo berhasil meraih juara IV kategori *homestay* dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan menjadi salah satu dari 4 desa wisata di Sumatera Barat yang berhasil meraih penghargaan dalam tingkat nasional.

Saat ini, pengelolaan Desa Sarugo dilakukan oleh Pokdarwis Desa Sarugo dengan kolaborasi bersama beberapa pihak, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Barat, dan Fakultas Pariwisata UMSB. Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan Desa Sarugo ini, yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan. Dikarenakan setiap destinasi wisata merupakan kepemilikan dari Kabupaten atau Kota, maka dinas pariwisata provinsi tidak bisa ikut campur terlalu dalam pengelolaannya. Namun lebih kepada memberikan pembinaan atau pendampingan. Bentuk pembinaan yang dilakukan ini, yaitu pada awalnya beberapa desa wisata ini akan diseleksi dan setelah didapatkan yang terbaik, barulah berfokus ke yang terbaik tersebut.

Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu mengadakan pelatihan pelaku desa wisata yang diadakan selama 1 minggu di Harau. Lalu, bimbingan teknis untuk pembina atau penasihat desa wisata dan uji kompetensi kinerja yang kemudian diberikan sertifikat. Selain itu, juga terdapat keterlibatan pihak swasta, yaitu adanya kerja sama antara Desa Sarugo dengan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Sumatera Barat. HPI ini berperan dalam mempromosikan dan menjual paket wisata di Desa Sarugo yang kemudian memberikan respon terhadap kebutuhan wisatawan. Selain keterlibatan pihak swasta, Desa Sarugo juga mulai diekspos oleh beberapa media. Beberapa media tersebut, yaitu siaran televisi Trans 7. Desa Sarugo sudah pernah diliput dalam siaran Jejak Petualang dan Si Bolang, dan juga sudah pernah diberitakan media tv lain, seperti GTV, MNC TV, dan Indosiar. Lalu, di Desa Sarugo ini juga pernah menjadi lokasi *shooting* film layar lebar, yaitu Begadang Rendang selama 15 hari. Pihak selanjutnya yang tak kalah penting dalam pengelolaan Desa Wisata Sarugo, yaitu akademisi. Yang merupakan akademisi disini, yaitu Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Fakultas ini merupakan cikal berdirinya Desa Sarugo karena sejarah pembentukan sarugo diinisiasi oleh beberapa mahasiswa yang mengikuti KKN di jorong ini. Mahasiswa melihat adanya potensi dari desa ini yang bisa dikembangkan, maka atas kerja sama mahasiswa dengan masyarakat dan Fakultas Pariwisata UMSB pada tanggal 31 Agustus 2019, resmiah desa ini menjadi desa wisata yang bernama Desa Saribu Gonjong atau Sarugo.

Meskipun telah memperoleh banyak penghargaan, pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo ini masih perlu beberapa pembenahan agar lebih optimal. Hal ini dikarenakan destinasi wisata ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas dan masih sedikit kunjungan, baik

itu dari segi domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Kampuang Sarugo pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kunjungan Wisatawan ke Kampuang Sarugo tahun 2019-2023

Bulan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	-	60	135	181	387
Februari	-	128	119	143	282
Maret	-	116	523	111	172
April	-	-	92	56	245
Mei	-	-	184	127	77
Juni	-	112	214	98	203
Juli	-	265	116	231	217
Agustus	-	253	123	314	304
September	19	180	254	58	5
Oktober	77	93	66	114	146
November	71	120	226	89	49
Desember	78	133	83	121	27
Total	245	1.460	2.135	1.643	2.114

Sumber: Pokdarwis Desa Sarugo dan diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat kunjungan wisatawan ke Kampuang Sarugo masih berskala kecil setiap bulan dan jumlah pengunjung yang datang tidak menentu. Pada tahun 2019 sangat sedikit kunjungan wisatawan, yaitu hanya 245 orang pengunjung. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan juga belum stabil karena masih era *new normal pasca* Covid-19. Namun, sudah mulai ada peningkatan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 1.460 orang pengunjung. Dan sejak tahun 2021 hingga 2023, jumlah kunjungan mulai terus mengalami peningkatan. Namun, jumlah kunjungan ini masih belum stabil dan tidak menentu setiap bulannya.

Agar jumlah kunjungan bisa mengalami peningkatan, maka dibutuhkan pengelolaan optimal dalam menciptakan sebuah desa wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pengelolaan yang optimal di Desa Wisata Kampuang Sarugo ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Apabila dikelola secara baik dan maksimal, maka tentu dapat diperoleh pula hasil yang lebih optimal hingga Kampuang Sarugo ini bisa lebih dikenal dan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Kerja sama yang dilakukan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan kerja sama dari pihak lain agar terjalin suatu hubungan kolaborasi yang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata harus mampu memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru.

Adanya kerja sama dari berbagai sektor merupakan konsep dari *collaborative governance*. Dalam proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembangunan kepercayaan, komitmen untuk berproses, pemahaman bersama tentang tujuan dan strategi, perantara hasil dan dialog tatap muka. Selain itu, juga dibutuhkan pembagian peran antar berbagai aktor dalam mencapai *collaborative governance*. Dalam pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo, pihak yang berkolaborasi antara lain pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu pihak swasta, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Sumatera Barat. Akademisi, yaitu Fakultas Pariwisata UMSB dan kolaborasi dengan masyarakat atau LSM yaitu dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sarugo. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sudah ada keikutsertaan beberapa aktor dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di desa wisata ini.

Dari serangkaian proses kolaborasi yang telah dilakukan, masih ditemukan permasalahan yang diduga disebabkan karena belum optimalnya proses kolaborasi. Selain akses komunikasi, Desa Sarugo memiliki kekurangan lain, yaitu akses jalan menuju Desa Sarugo yang rusak. Ada beberapa titik jalan menuju Desa Sarugo yang berlubang apalagi disaat musim hujan tiba, maka jalan akan menjadi licin dan susah untuk dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal lain yang menjadi kekurangan di Desa Sarugo sendiri, yaitu belum lengkapnya sarana prasarana seperti toilet umum, tempat parkir, dan ruang pertemuan. Dari serangkaian proses kolaborasi yang telah dilakukan masih belum optimal peran setiap aktor dalam proses kolaborasi. Hal ini bisa dilihat dari masih belum optimalnya keterlibatan beberapa aktor sehingga peran antar aktor tersebut belum terlihat secara nyata dan jelas. Dilihat dari aktor yang terlibat dalam kolaborasi tata kelola Desa Sarugo ini, sejalan dengan konsep kolaborasi *penta helix*. Latar belakang konsep *penta helix* dibangun atas dua model kolaborasi sebelumnya, yaitu *triple helix* dan *quadra helix*.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan Desa Sarugo telah mampu meraih beberapa prestasi dan penghargaan yang akan memudahkan dalam melaksanakan berbagai kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Namun, Peneliti menemukan masih belum banyak dikenalnya Desa Sarugo yang bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang masih sedikit dan tidak menentu. Hal ini diduga terjadi karena proses kolaborasi yang belum optimal yang bisa dilihat pada belum lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia dan juga belum tersedianya jaringan internet di Desa Wisata Kampuang Sarugo tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat maupun berbagai *stakeholder* terkait lainnya dalam pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. METODE

Penelitian *Collaborative Governance* dalam tata kelola Desa Sarugo menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran mengenai kondisi tertentu sesuai dengan masalah yang ada. Metode ini mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian, Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan melakukan interpretasi terhadap kondisi aktual yang terjadi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran aktor yang berkolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo dan proses kolaborasi yang dilaksanakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan teori yang mendasari penelitian ini termasuk konsep *collaborative governance* seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Wialdi et al., 2022). *Collaborative governance* adalah proses pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun media, untuk mencapai tujuan bersama melalui pengambilan keputusan kolektif yang deliberatif dan berorientasi pada konsensus. Teori ini memiliki empat variabel utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Faktor awal yang memengaruhi kolaborasi meliputi tingkat kepercayaan, keseimbangan sumber daya, dan insentif untuk berpartisipasi. Ketidakseimbangan sumber daya menjadi salah satu pendorong terjadinya kolaborasi, yang memungkinkan pihak-pihak dengan kelebihan sumber daya untuk membantu aktor lain yang kekurangan.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Aturan dasar yang jelas, transparansi, dan partisipasi aktor dalam kolaborasi adalah elemen penting dalam menciptakan legitimasi dan kelancaran proses. Desain kelembagaan juga mencakup pembentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif mencakup peran pemimpin dalam membangun komunikasi antar aktor, mendorong dialog terbuka, dan memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi secara maksimal. Pemimpin juga bertindak sebagai penghubung untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak.

4. Proses Kolaborasi (*The Collaborative Process*)

Melibatkan dialog tatap muka yang konstruktif, membangun kepercayaan di antara aktor, memastikan adanya komitmen bersama, menciptakan pemahaman yang seragam, serta melakukan evaluasi terhadap hasil sementara guna penyesuaian lebih lanjut.

Sebagai tambahan, penelitian ini mengacu pada model *Penta Helix* yang menekankan pentingnya sinergi antara lima elemen utama: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Kolaborasi ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing elemen dalam memperkuat keberhasilan tata kelola desa wisata. Dengan mengintegrasikan model ini, penelitian mengeksplorasi bagaimana peran aktor-aktor ini saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif bagi Desa Sarugo.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi mengikuti perkembangan waktu. Adanya adaptasi ini dilakukan dalam rangka membentuk kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. *Collaborative Governance* merupakan sebuah konsep dalam upaya kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Tujuan lain dari kolaborasi ini yaitu untuk menerapkan kebijakan publik dan melaksanakan program-program publik guna menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan pemerintah adalah dalam aspek pariwisata yaitu kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adanya kolaborasi yang terjalin dalam tata kelola Desa Sarugo merupakan sebuah bentuk upaya pemerintah yang dilakukan guna mendukung pengelolaan Desa Sarugo. Kolaborasi yang

terjalin melibatkan berbagai pihak dan tentunya dengan keinginan dari masyarakat sendiri. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa memajukan daerah Kampuang Sarugo dan membantu kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya sektor pariwisata tersebut. Dalam pengelolaan Desa Sarugo, kolaborasi berbagai *stakeholder* sudah dilakukan sejak awal pembentukan desa ini menjadi desa wisata. Namun seiring berjalannya waktu ditemui beberapa tantangan hingga saat ini yang menjadikan kolaborasi yang dilakukan *stakeholder* belum maksimal dan belum mampu meraih tujuan yang diinginkan dari adanya kolaborasi. Tantangan itu bisa dilihat dari masih adanya berbagai permasalahan dan kekurangan yang dimiliki Desa Sarugo saat ini oleh sebab itu muncul sebuah harapan demi maksimalnya pengelolaan Desa Sarugo hingga nanti bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berikut hasil pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (Wialdi et al., 2022):

1. Kondisi Awal

Menurut Ansell and Gash, kondisi pada awal kolaborasi dapat menjadi faktor pendorong atau menghambat berjalannya kolaborasi antar *stakeholder* terkait. Variabel dalam menganalisis kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo berdasarkan indikator dari Ansell dan Gash, yaitu ketidakseimbangan sumber daya dan insentif untuk berpartisipasi sebagai berikut:

a. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Dalam sebuah kolaborasi, unsur sumber daya merupakan unsur penting dalam berjalannya kolaborasi. Dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo, *stakeholder* yang terlibat, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Himpunan Pramuwisata Sumatera Barat, Akademisi Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sarugo. Adanya ketidakseimbangan sumber daya dalam kolaborasi menjadi sebuah kebutuhan karena dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, maka *stakeholder* akan saling bekerja sama untuk melakukan kolaborasi dalam memberikan dukungan atau peran yang dimilikinya masing-masing dan dapat menutupi atau membantu kekurangan yang dimiliki *stakeholder* lain hingga nantinya dapat meminimalisir tantangan dan masalah yang dihadapi dalam kolaborasi.

Pada pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo yang dipertanggungjawabkan secara utama oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maka dari segi SDM masih ditemui kekurangan. Kekurangan yang ada ini, yaitu ketidakmampuan dari Pokdarwis dalam mengelola sendiri desa wisatanya, maka pihak Podarwis membutuhkan bantuan dari pihak luar. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya pihak Pokdarwis memiliki pengetahuan tentang bagaimana memaksimalkan pengelolaan desa wisata ini. Maka, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pada awal pembentukan Desa Sarugo, masyarakat belum memiliki pemahaman sepenuhnya mengenai pengelolaan pariwisata. Disebabkan adanya ketidakseimbangan sumber daya atau ketidakmampuan SDM dalam mengelola destinasi sendiri, maka dari hal tersebut masyarakat membutuhkan pihak luar dalam memberikan arahan dan masukan terkait bagaimana pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Diharapkan dengan adanya bantuan dari luar dengan mendatangkan orang-orang yang ahli pada bidang pariwisata tersebut, maka akan mempermudah dan membantu mengembangkan desa wisata Kampuang Sarugo.

b. Insentif Untuk Berpartisipasi

Insentif merupakan sebuah hal yang menjadi motivasi dan dorongan untuk meningkatkan partisipasi antar para *stakeholder* dalam berkolaborasi. Logsdon mengatakan bahwa dorongan-dorongan partisipasi dalam proses kolaborasi akan dapat meningkat jika para *stakeholders* menganggap bahwa tujuan mereka bergantung pada kerja sama dari *stakeholders* lainnya.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif hadir dalam upaya membantu para *stakeholder* dalam melaksanakan kolaborasi dan memudahkan para pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya dalam berkolaborasi. Adanya kepemimpinan fasilitatif sangat penting dalam menyatukan para pemangku kepentingan dan membuat antar aktor saling terlibat dalam kolaborasi. Indikator kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi yaitu penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog dan mengeksplor keuntungan bersama.

a. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah dengan adanya aturan yang jelas dalam melakukan suatu kegiatan. Kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Kampuang Sarugo, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penetapan kebijakan tersebut, yakni Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Nagari Wisata, dan salah satunya yaitu Nagari Wisata Budaya Desa Sarugo. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota merupakan kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan pengembangan Desa Sarugo, maka dari itu pemimpin membutuhkan tindakan dalam merangkul para *stakeholder* untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo.

b. Memfasilitasi Dialog

Memfasilitasi dialog merupakan bagaimana seorang pemimpin harus dapat meyakini para aktor dalam melaksanakan kolaborasi, yaitu dengan memberikan bimbingan sehingga kolaborasi tercapai. Memfasilitasi dialog yang terjadi dalam kolaborasi tata kelola desa Kampuang Sarugo dilihat dari pertemuan-pertemuan yang diadakan para *stakeholder* dan dengan aktor mana berkolaborasinya. Dalam kolaborasi yang dilakukan Desa Sarugo, pihak Pokdarwis selaku pengelola utama dari desa wisata ini menyediakan wadah atau tempat bagi para aktor dalam kolaborasi untuk melakukan pertemuan atau evaluasi.

c. Mengeksplorasi Keuntungan Bersama

Eksplorasi keuntungan bersama merupakan sebuah tindakan untuk mencari keuntungan dengan tujuan menemukan sesuatu yang lebih baik hingga mampu menguntungkan setiap pihak terkait. Dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo ini keuntungan yang didapat bisa dikatakan tidak dilihat secara langsung, namun ada keuntungan yang diperoleh masing-masing *stakeholder* yang berkolaborasi. Dalam variabel mengeksplorasi keuntungan bersama sudah cukup optimal karena masing-masing aktor sudah merasakan keuntungan dari kolaborasi Desa Sarugo meskipun tidak semuanya merasakan keuntungan langsung.

3. Desain Institusional

Desain institusional merupakan sebuah upaya para pemimpin dalam meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi demi perolehan bersama. Desain institusional oleh Ansell dan Gash melalui partisipasi, aturan dasar yang jelas dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi.

a. Partisipasi

Partisipasi disini menekankan bahwa pemerintah dalam proses kolaborasi harus terbuka antar aktor, yang mana jika partisipasi *stakeholder* saling berkesinambungan maka kolaborasi yang berjalan akan baik. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah mewadahi kolaborasi sejumlah *stakeholder*. Dalam hal ini, pemerintah mengajak dan memberikan ruang kepada Pokdarwis dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang ada dalam mengelola pariwisata dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu melalui bidang pariwisata.

Dalam menjalankan kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang terlibat memberikan partisipasi berupa pembinaan dan mendukung segala kegiatan dalam rangka memajukan Desa Sarugo. Dalam berkolaborasi terkait pengelolaan Desa Sarugo, HPI Sumatera Barat memiliki peran sebagai media promosi. Pihak HPI membantu dalam mempromosikan Desa Sarugo dan sekaligus menjadi *tour guide* untuk membawa wisatawan ke Desa Sarugo. Sedangkan partisipasi dari aktor lain yaitu Fakultas Pariwisata UMSB untuk pengelolaan Desa Sarugo yaitu merupakan pihak yang menjadi cikal berdirinya Desa Sarugo. Keterlibatan peran yang diberikan oleh UMSB dimulai sejak sebelum desa ini menjadi Desa Sarugo. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang diberikan para aktor yang berkolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo itu berbeda-beda.

b. Aturan Dasar yang Jelas

Adanya sebuah aturan dasar yang jelas sangat dibutuhkan dalam berjalannya sebuah kolaborasi. Dalam pengelolaan Desa Sarugo, aturan dasar dalam mendukung kolaborasi, yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Fakultas Pariwisata UMSB. Aturan dasar dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo tidak dimiliki semua aktor. Aturan hanya ada antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Fakultas Pariwisata UMSB melalui surat perjanjian kerja sama. Sedangkan, untuk aturan dasar keterlibatan HPI dalam kolaborasi itu tidak ada aturan atau surat perjanjiannya.

c. Transparansi Pelaksanaan Kolaborasi

Transparansi dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo disini, yaitu menyangkut pada keterbukaan masing-masing aktor dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Pelaksanaan kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan Desa Sarugo itu secara transparansi yaitu melalui pertemuan yang diadakan oleh Pokdarwis setiap bulannya. Tujuan dari pertemuan ini yaitu membahas apa kendala dan apa-apa yang akan dilakukan sehingga segala kegiatan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama yaitu memajukan pariwisata demi mensejahterakan masyarakat. Selain itu, adanya transparansi juga bertujuan agar terciptanya sebuah kejelasan mengenai peran dan tugas masing-masing aktor serta adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan atau program-program yang

dilakukan. Namun masih ditemukan sedikit kendala mengenai transparansi ini yaitu belum adanya pelaporan dari pihak Pokdarwis kepada nagari terkait laporan pertanggung jawaban Desa Sarugo. Sementara pemerintah nagari merupakan instansi yang menerbitkan SK Pokdarwis.

4. Proses Kolaborasi

a. Pertemuan Tatap Muka

Dalam pertemuan tatap muka dilihat dari pelaksanaan pertemuan dan komunikasi rutin yang dilakukan antar aktor dengan tujuan agar kolaborasi diinginkan dapat dicapai. Menurut Ansell dan Gash, adanya pertemuan rutin ini bertujuan untuk mengidentifikasi keuntungan bersama serta meminimalisir adanya ketidakpahaman atas penyampaian informasi antar *stakeholder*. Terkait pertemuan *face to face* dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo antar aktor yang berkolaborasi tidak saling terhubung. Maksudnya, kalau untuk pertemuan antara pihak Pokdarwis dengan masyarakat itu dilakukan dengan adanya rapat evaluasi dan pertemuan rutin. Pertemuan tatap muka dalam kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pertemuan rutin yang dilakukan hanya ada antara masyarakat dengan pihak Pokdarwis. Sedangkan, dari aktor lain itu tidak ada pertemuan rutin, ada kunjungan atau evaluasi dari Dinas Parpora Kabupaten Lima Puluh Kota namun hanya sekali dalam setahun sedangkan Desa Sarugo ini merupakan destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi, yaitu melalui saling menerima masukan dan tanggung jawab antar aktor. Saling menerima dapat dilihat pada sikap aktor yang saling menghargai atas keputusan dan masukan yang diberi aktor lain dalam berkolaborasi. Dalam membangun kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi dalam Desa Sarugo itu sudah baik, di imana dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu bimbingan teknis sadar wisata oleh Dinas Pariwisata provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat mengenai sadar wisata. Diharapkan nantinya masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki pada bidang pariwisata dan mampu mengelola potensi tersebut menjadi sebuah nilai ekonomis yang dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Komitmen Bersama

Komitmen bersama pada proses ini berkaitan pada keyakinan para aktor yang berkolaborasi untuk mampu menjalankan proses kolaborasi sesuai perjanjian dan tujuan sebagaimana mestinya. Komitmen yang dilaksanakan dapat berupa pelaksanaan tugas sesuai tupoksi masing-masing *stakeholder*. Dalam proses kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota, komitmen antar aktor yang berkolaborasi berdasarkan yang Peneliti temui di lapangan telah ada komitmen terhadap apa yang direncanakan, seperti kolaborasi dengan UMSB. Disini pihak terkait, yaitu pemerintah kabupaten dan pihak UMSB saling berkomitmen sesuai perjanjian di awal terkait pengembangan Desa Sarugo. UMSB senantiasa kebersamaian dan membantu dalam pembangunan non fisik sejak awal pembentukan Pokdarwis hingga Desa Sarugo menjadi desa wisata. Dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo telah ada komitmen bersama antar aktor yang berkolaborasi. Hal itu dilakukan melalui pemberian bantuan berupa pembinaan

dan pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam rangka meningkatkan keterampilan sdm Desa Sarugo agar dapat mengelola potensi wisata yang mereka miliki.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, yaitu adanya saling berbagi pandangan dalam kolaborasi. Pemahaman bersama dalam kolaborasi merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan penilaian dari ruang lingkup para aktor yang berkolaborasi. Pemahaman bersama merupakan tanggung jawab seluruh *stakeholder* dalam menghindari permasalahan yang bisa muncul antar *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo.

Adanya pemahaman bersama di tengah masyarakat merupakan sebuah pendorong dalam mengembangkan destinasi wisata. Adanya pemahaman bersama ini juga menyangkut hak dan kewajiban dari setiap aktor yang berkolaborasi. Masyarakat harus menyadari bahwa dengan mereka saling bekerja sama dan memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola Desa Sarugo, maka mereka mampu mengembangkan Desa Sarugo hingga semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan.

e. Hasil Sementara

Tahap terakhir yang dilihat pada proses kolaborasi adalah hasil sementara dari pelaksanaan kolaborasi. Hasil sementara bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat hasil yang tetap. Dari hasil sementara ini bisa dijadikan acuan dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kolaborasi selanjutnya. Mengenai hasil sementara ini, Peneliti mengambil pemahaman berdasarkan yang Peneliti dapatkan di lapangan, yaitu setiap aktor berpedoman kepada pencapaian setiap *stakeholder* dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo. Hasil sementara ini dapat dikatakan dengan adanya hasil yang positif dan mengarah pada kemajuan, namun harus tetap dilakukan berbagai upaya hingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan. Dampak-dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Desa Wisata Sarugo ini. Perekonomian masyarakat menjadi meningkat dan masyarakat memiliki pemahaman yang bertambah dengan adanya Desa Sarugo ini. Selain itu, dengan kehadiran Desa Sarugo masyarakat juga bisa bertemu para artis dan tokoh terkenal, bahkan ada yang serumah dengan artis yang berkunjung ke Desa Sarugo. Adanya dampak-dampak ini diharapkan bisa sejalan dengan pembenahan dalam pengelolaan Desa Sarugo.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Peneliti menyimpulkan bahwa seluruh aktor sudah ikut berperan, namun peran aktor belum berjalan maksimal dan proses kolaborasi belum berjalan dengan baik berdasarkan teori Ansell dan Gash yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaan kolaborasi masih ditemui beberapa kendala, yaitu pada kondisi awal terdapat ketidakseimbangan sumber daya sehingga memerlukan terjadinya kolaborasi. Ketidakseimbangan sumber daya dapat dilihat dari adanya SDM yang kurang mampu dalam mengelola destinasi wisatanya sehingga mendorong untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian mengenai penetapan kebijakan ada aturan yang menjadi landasan dalam melakukan kolaborasi.

Selanjutnya, dalam hal partisipasi antar aktor sudah berjalan namun belum maksimal. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan Desa Sarugo meliputi pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat), kelompok masyarakat (Pokdarwis), akademisi (Fakultas Pariwisata UMSB), pihak swasta (Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Barat), dan media. Meski semua aktor telah menunjukkan kontribusinya, partisipasi mereka belum optimal. Hal ini terlihat dari peran Pokdarwis yang masih mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengelola desa wisata secara mandiri. Partisipasi dari aktor lain sebagian besar berupa pembinaan dan pelatihan teknis, namun belum menyoar penguatan keberlanjutan tata kelola. Hambatan lain adalah kurangnya koordinasi intensif di antara aktor dan perbedaan pemahaman dalam masyarakat yang menghambat pembentukan visi bersama.

Proses kolaborasi yang berjalan sudah menunjukkan hasil sementara yang positif, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi pada masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti kemandirian Pokdarwis, diperlukan langkah strategis yang lebih tajam, termasuk pemetaan aktor strategis untuk memastikan distribusi peran yang lebih efektif. Pemetaan ini juga dapat membantu mengidentifikasi aktor kunci yang dapat mendorong penguatan kolaborasi melalui dialog tatap muka yang lebih intensif dan perencanaan berbasis konsensus. Dengan langkah ini, kolaborasi dapat lebih menyumbang pada perbaikan tata kelola, baik dari segi efektivitas program maupun keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

REFERENSI

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kepariwisata yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 di Kabupaten Pati). *In Conference on Public Administration and Society*, 1(1): 92-118.
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2): 170-177.
- Azhari, A. K. (2017). Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata Alam: Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah. *Journal of Tourism and Creativity*, 1(2): 121-140.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2): 158-163.
- Del Rosa, Y. (2019). Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2): 208-217.
- Hanafi, M. (2022). Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative Governance di Kabupaten Magelang. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1): 1-17.
- Kadir, A. W., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2013). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Propvinsi Sulawesi Selatan (Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1): 11-21.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1): 68-84.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1): 7-12.

- Maulana, F., & Agustina, I. H. (2022, August). Identifikasi Pola Ruang Kampung Sarugo Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota. *In Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(2): 616-625.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2): 140-148.
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). Model Collaborative Governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. *Media Bina Ilmiah*, 14(4): 2357-2366.
- Rozikin, M. (2019). Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi di Kota Malang). *PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 2(2): 49-57.
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & Tarifu, L. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1): 114-132.
- Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Journal Publika*, 8(4): 1-10.
- Tedjaningsih, T., Suyudi, S., & Nuryaman, H. (2018). Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Agribisnis Mendong. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(2): 210-226.
- Wialdi, P. F., Putera, R. E., Ariany, R., & Hasymi, E. (2022). The Collaboration of Padang City Government in Managing Covid-19 Disaster through The Dynamic Governance Concept. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2): 173-189.
- Yuliani, R., & Abdi, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kampung Saribu Rumah Gonjong. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 15(2): 85-92.
- Zaenuri, M. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *UNISIA: Journal of Social Sciences and Humanities*, 36(81): 157-168.